



LUMAJANG
EKSOTIK

tribulan 11

LKJ

LAPORAN KINERJA

Kepala Bagian
Tata Pemerintahan

2
0
2
2



BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tribulan II Tahun Anggaran 2022. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 6 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur dan manajemen pelaporan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta kerjasama dan administrasi kewilayahan. Adapun fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi Kewilayahan;



2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama dan administrasi kewilayahan;
3. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;
5. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100 %
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %



LUWANG
KASOTIK

**LAPORAN KINERJA
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TAHUN 2022**

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 April s.d 30 Juni 2022, capaian kinerjanya adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Tribulan II Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25%	25%	100%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	25%	25%	100%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	25%	25%	100%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	25%	25%	100%
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	17%	17%	100%
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	23%	69%	300%
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	50%	50%	100%
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	0 %	0%	0%



Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tribulan II yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 25% dengan realisasi 25%.
2. Capaian kegiatan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor Tribulan II yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 25% dengan realisasi 25%.
3. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Umum PD Tribulan II yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 25% dengan realisasi 25%.
4. Capaian kegiatan fasilitasi pemeliharaan BMD Tribulan II yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 25% dengan realisasi 25%
5. Capaian kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Tribulan II yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 17% dengan realisasi 17%. Kinerja pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang sudah terlaksana pada Tribulan II yaitu Peringatan Hari Otonomi Daerah.
6. Capaian kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan pada Tribulan II yaitu 300% melebihi target sebesar 23% dengan realisasi 69% dikarenakan banyaknya permohonan kerjasama yang diajukan kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.
7. Capaian kegiatan Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah Tribulan II yaitu 50% telah memenuhi target sebesar 50% dengan realisasi 50%.
8. Capaian kegiatan Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sudah dilaksanakan pada Tribulan I dan akan dilaksanakan lagi pada Tribulan IV.



Berikut capaian kinerja terhadap target satu tahun di Tahun 2022, yaitu :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	50%	50%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	50%	50%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	50%	50%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	50%	50%
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	50%	50%
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100%	131%	131%
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	50%	50%
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	50%	50%

Dari tabel 2.3 terlihat bahwa untuk kegiatan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar 50% terhadap target 100%, kegiatan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor terealisasi sebesar 50%



dari target 100%, kegiatan fasilitasi Administrasi Umum PD terealisasi sebesar 50% dari target 100%, kegiatan fasilitasi pemeliharaan BMD PD terealisasi sebesar 50% dari target 100%, kegiatan Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan terealisasi sebesar 50% dari target 100%, kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan terealisasi sebesar 131% dari target 100%, kegiatan Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan terealisasi sebesar 50% dari target 100% dan kegiatan Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja terealisasi sebesar 50% dari target 100% yang telah dilaksanakan pada Tribulan I. Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.4 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.



Tabel 2.4
Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2022 - Tribulan II

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.154.000	Rp 6.536.000	64%	25 %	25%	100%	36%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Rp 40.747.800	Rp 39.397.670	97%	25 %	25%	100%	3%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Rp 64.031.000	Rp 40.587.031	63%	25 %	25%	100%	37%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Rp 18.295.000	Rp 13.333.600	73%	25 %	25%	100%	27%



**LAPORAN KINERJA
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TAHUN 2022**

	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 186.472.680	Rp 129.356.697	69%	33 %	33%	100%	31%
	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	Rp 28.610.000	Rp 8.332.500	29%	23 %	69%	300%	271%
	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	Rp 0	Rp 0	0%	50%	50%	100%	100%
	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	-	-	-	-	-	-



Dari tabel 2.4 terlihat bahwa :

1. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tribulan II yaitu 36% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, sedangkan capaian anggaran 64% dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sd/ Juni sebesar Rp 6.536.000.
2. Efisiensi Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor yaitu 3% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, sedangkan capaian anggaran 97% dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sd/ Juni sebesar Rp. 39.397.670 dikarenakan sampai pada Tribulan II penyesuaian *timeschedule* persentase sesuai standar.
3. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD yaitu 37% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, sedangkan capaian anggaran 63% dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sd/ Junisebesar Rp. 40.587.031 dari target sampai pada Tribulan II sebesar Rp 60.031.000.
4. Efisiensi Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD yaitu 27% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, sedangkan capaian anggaran 73% dengan realisasi anggaran sesuai sesuai Kartu Kendali Periode Januari sd/ Juni sebesar Rp. 13.333.600 dari target sampai pada Tribulan II sebesar Rp 18.295.000.
5. Efisiensi Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yaitu 31% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 33%, sedangkan capaian anggaran 29% dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sd/ Juni sebesar Rp. 129.356.697 dari target sapai pada Tribulan II sebesar Rp 186.472.680.
6. Efisiensi Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan yaitu 271% dengan capaian kinerja sebesar 300% dengan realisasi kinerja telah melebihi target sebesar 23%, sedangkan capaian



anggaran 25% dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sd/ Juni sebesar Rp. 8.332.500 dari target sampai pada Tribulan II sebesar Rp 28.610.000. Belum dilaksanakan kegiatan evaluasi kerjasama dikarenakan masih koordinasi dengan Bappeda karena di Bappeda terdapat anggaran evaluasi kerjasama juga.

7. Efisiensi Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yaitu 100% dengan capaian kinerja 50% sudah memenuhi target kinerja.
8. Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan pada Tribulan IV.

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.4 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran sampai pada tribulan II Tahun Anggaran 2022, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

Tabel 2.5
Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 19.833.000	Rp 6.536.000	32.96%	25 %	25%	100%	67.04%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Rp 81.495.600	Rp 39.397.670	48.34%	25 %	25%	100%	51.66%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Rp127.886.400	Rp 40.587.031	31.74%	25 %	25%	100%	68.26%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Rp 35.995.000	Rp 13.333.600	37.04%	25 %	25%	100%	62.96%



Dari tabel 2.5 terlihat bahwa :

1. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tribulan II yaitu 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, sedangkan capaian anggaran 32.96% dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sampai dengan Juni Rp. 6.536.000 rupiah dari target Tahun 2022 sebesar Rp 19.833.000.
2. Efisiensi Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor yaitu 51.66% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, sedangkan capaian anggaran 48.34% dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sampai dengan Juni Rp. 39.397.670 rupiah dari target Tahun 2022 sebesar Rp 81.495.600.
3. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD yaitu 68.26% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, sedangkan capaian anggaran 31.74% dengan realisasi anggaran dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sampai dengan Juni Rp. 40.587.031 rupiah dari target Tahun 2022 sebesar Rp127.886.400.
4. Efisiensi Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD yaitu 62.96% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, sedangkan capaian anggaran 37.04% dengan realisasi anggaran dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sampai dengan Juni Rp. 6.536.000 rupiah dari target Tahun 2022 sebesar Rp35.995.000.
5. Efisiensi Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yaitu 75.47% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 33%, sedangkan capaian anggaran 24.53% dengan realisasi anggaran dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sampai dengan Juni Rp. 8.332.500 rupiah dari target Tahun 2022 sebesar Rp 527.337.980.



6. Efisiensi Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan yaitu 284.3% dengan capaian kinerja sebesar 300% dengan realisasi kinerja telah melebihi target sebesar 23%, sedangkan capaian anggaran 15.70% dengan realisasi anggaran dengan realisasi anggaran sesuai Kartu Kendali Periode Januari sampai dengan Juni Rp. 8.332.500 rupiah dari target Tahun 2022 sebesar Rp 53.079.850. Belum dilaksanakan kegiatan evaluasi kerjasama dikarenakan masih koordinasi dengan Bappeda karena di Bappeda terdapat anggaran evaluasi kerjasama juga.
7. Efisiensi Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yaitu 100% dengan capaian kinerja dan anggaran sebesar 100% sudah memenuhi target sebesar 50%.
8. Kegiatan Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan pada Tribulan I, dan akan dilaksanakan lagi pada Tribulan IV.

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.5 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di tribulan II Tahun Anggaran 2022, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tribulan II tahun anggaran 2022, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah penyerapan anggaran kegiatannya. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai di sisa tahun anggaran adalah sebagai berikut :



Tabel 2.6

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN setiap bulan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2022
2.	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor setiap bulan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2022
3.	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD setiap bulan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2022
4.	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan mobil dinas dan pemeliharaan komputer dan printer secara berkala	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2022
5.	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Telah melaksanakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembayaran APKASI tepat waktu Telah Mempersiapkan peta dasar dan aplikasi Arcgis untuk pelaksanaan penetapan batas desa Telah Melaksanakan kegiatan Upacara Hari Otonomi Daerah Melaksanakan pengajuan Perbup Batas Desa	Dilaksanakan Tribulan I Dilaksanaan pada Tribulan II Dilaksanakan pada Tribulan III



		Melaksanakan Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Melaksanakan Sosialisasi Pemilu	Dilaksanakan pada Tribulan IV
6.	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	Melaksanakan koordinasi dengan OPD yang mengajukan Kerja Sama dan melaksanakan evaluasi kerjasama di Tribulan IV	Dilaksanakan koordinasi rapat kerjasama rutin tiap bulan sesuai dengan pengajuan draft kerja sama Dilaksanakan evaluasi Kerjasama di Tribulan IV
7.	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Melakukan pelaporan penatausahaan barang secara tepat waktu	Dilakukan pada Tribulan II dan Tribulan IV
8.	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Melaksanakan perencanaan anggaran secara tepat waktu	Dilakukan pada Tribulan I dan Tribulan IV

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta penyelenggaraan Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan.
3. Melaksanakan semua kegiatan sesuai *Time Schedule* yang sudah ada;
4. Mempersiapkan peta dasar dan aplikasi arcgis untuk persiapan kegiatan penetapan batas.
5. Mempersiapkan data dan kelengkapan pengajuan validasi Batas Desa.
6. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait draft Kerjasama.



2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-



BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Realisasi anggaran yang sudah terlaksana belum terinput pada Laporan Realisasi Anggaran sehingga capaian anggaran belum maksimal.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah melalui :
 - a. Mencermati kembali *time schedule* kegiatan dan anggaran serta melaksanakannya sesuai *time schedule* yang ditetapkan;
 - b. Koordinasi dengan Bappeda terkait kegiatan Evaluasi Kerjasama.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat


Drs. BASUNI

NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Juni 2022

Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP, M.Si

NIP. 19870404 200701 1 002